

Receive : 19 May 2022
Revised : 03 June 2022
Accepted : 03 June 2022

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i1.46

Vol. 4 No. 1, Juni 2022, Hlm. 50-63



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TINGGEDE KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

Nuraisyah¹, *M Syukur², Sussanti²

E-Mail : *syukurpacoppori79@gmail.com

Universitas Tadulako¹

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Analisis data mendasarkan teori Ericson yang terdiri dari tiga aspek, yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Desa Tinggede relatif masih sangat rendah, Faktor penyebab sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, karena masyarakat belum dilibatkan secara penuh dalam memutuskan kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi. Perencanaan belum sepenuhnya mengacuh pada masalah dan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, serta pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan. Akibat dari rendahnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan sesuai dengan fungsinya sehingga mengakibatkan program hasil pembangunan tersebut mudah rusak. Secara keseluruhan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan yang dilihat dari pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan disimpulkan belum menunjukkan hasil yang relatif belum maksimal, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan meskipun hasil pembangunan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau dengan kondisi geografis dan iklim yang berbeda dengan persebaran penduduk yang tidak merata diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini maka akan sulit untuk terjadinya suatu pemerataan pembangunan yang menyeluruh di wilayah Indonesia, apalagi dengan sistem otonomi daerah seperti sekarang ini yang memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri sehingga dapat menimbulkan jenjang antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha memajukan bangsa tanpa akhir, selain itu pembangunan merupakan proses pewujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia.

Kaitannya dengan pembangunan di Desa Tinggede, peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa mengingat masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber daya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat di Desa

Tinggede, maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan usaha yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Terlebih dengan diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berintikan penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa, Kelurahan maupun Kecamatan.

Pembangunan yang dilakukan di Desa Tinggede, merupakan proses pewujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia karena berbagai faktor penyebab dimana salah satu faktornya adalah faktor geografis. Kondisi geografis wilayah

Indonesia terdiri atas banyak pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan dimana penduduknya tersebar di hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia secara tidak merata, faktor persebaran penduduk yang tidak merata ditambah lagi dengan akses atau infrastruktur yang tidak sama dan merata antara satu wilayah dengan wilayah lain menjadi salah satu penghambat untuk mewujudkan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Selain itu adanya sistem otonomi daerah juga menjadi salah satu penghambat dalam pemerataan pembangunan karena adanya kebebasan pada setiap daerah untuk memanfaatkan segala potensi yang ada di daerahnya untuk dimanfaatkan membuat adanya jenjang antara daerah yang memiliki potensi sumber daya dengan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya. Dalam hal ini pemerintah menyadari bahwa tidak mungkin menyamaratakan pembangunan pada setiap daerah, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat suatu peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait dengan undang-undang tersebut di atas, pembangunan daerah disertai dengan otonomi daerah sangat relevan dengan pembangunan secara menyeluruh, dinyatakan juga bahwa terdapat empat

hal yang mendasari adanya penyamarataan keuangan antara pusat dengan daerah atau pembangunan daerah yaitu:

1. Pembangunan daerah sangat tepat diimplementasikan dalam perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumber daya publik seperti sektor perikanan, pertanian dan kehutanan
2. Pembangunan daerah diyakini mampu memenuhi harapan keadilan ekonomi bagi sekian banyak orang yang tercermin dalam otonomi daerah
3. Pembangunan daerah dapat menekan biaya transaksi
4. Pembangunan daerah dapat meningkatkan daya beli domestik

Keempat hal di atas yang mendasari adanya penyamarataan keuangan antara pusat dengan daerah atau pembangunan daerah mempunyai makna strategis dalam rangka mengembangkan perekonomian di daerah khususnya di desa, hal tersebut terjadi karena desa menyimpan banyak nilai-nilai lokal yang perlu diberikan peluang untuk berkembang dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat didalamnya. Pembangunan kaitanya dengan Desa Tinggede adalah semua kegiatan masyarakat desa baik fisik maupun sosial, pembangunan desa sangatlah tergantung pada dinamika kehidupan masyarakat yang merupakan suatu usaha atau dukungan masyarakat

terhadap rancangan program yang telah direncanakan.

Kesatuan antara penduduk, sumber daya alam, dan organisasi kelembagaan desa merupakan unsur paling utama dalam menentukan keberhasilan program pembangunan suatu wilayah atau desa, masyarakat merupakan sentral pembangunan karena dari masyarakat dan oleh masyarakatlah proses pembangunan dapat dilaksanakan. Selain itu keberhasilan program pembangunan banyak ditentukan juga oleh sifat kemampuan dan ketrampilan para pemimpin yang ada di desa dalam menggerakkan kegiatan pembangunan, pemimpin yang dapat membimbing dan membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya secara tidak langsung akan dapat merangsang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan atau dengan kata lain masyarakat ingin berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Untuk peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diterbitkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0259/M. PPN/I/2005/050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2005

dari tingkat desa hingga Kabupaten/Kota.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun SPPN yang terpadu, menyeluruh, sistematis, yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang dan waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Kebijakan tersebut mengatur sistem perencanaan yang bersifat *top down* serta perencanaan yang bersifat *bottom up* untuk menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi. Dalam

hal ini upaya penciptaan wadah partisipasi oleh pemerintah salah satunya adalah dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan inilah pola *bottom up* digunakan, yang dilaksanakan dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Namun ruang partisipasi masyarakat yang terbuka hanya ada di musrenbang Desa. Hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Slamet (1994:25) mengatakan bahwa partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh 3 faktor pendukungnya yaitu adanya kemauan kemampuan kesempatan untuk berpartisipasi. kemampuan dan kemauan berasal dari yang bersangkutan sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberikan peluang. Apabilah ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari masyarakat. Meskipun pemerintah juga telah memberikan peluang. Maka partisipasi juga pun tidak akan terjadi. Begitu pun juga jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak adanya ruang atau kesempatan yang di berikan yang di berikan pemerintah untuk warga atau kelompok masyarakat,

maka partisipasi pun juga tidak akan terjadi.

Untuk mewujudkan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, di era otonomi ini perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tataran pemerintahan perlu ditambahkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi (*Good Governance*). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan dikembangkan mekanisme yang memberikan kewenangan dan peluang partisipasi warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi masyarakat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dalam pembangunan bisa dijadikan salah satu cerminan fenomena yang masih melekat di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat masih saja mengalami kesenjangan dalam kaitannya dengan keberadaan mereka ketika akan memasuki area-area publik. Bila dilihat dari sisi peran, akses, manfaat, maupun kontrol. Keterkaitan antara ketidakadilan pemerintah dan partisipasi masyarakat bisa dikatakan sangat erat. Persoalan perbedaan peran dalam lingkup ruang publik dan ruang domestik bisa dikatakan adalah faktor utama dalam hal ini kaitannya dengan minimnya partisipasi mereka dalam

musrenbang. Faktor bisa yang disebabkan budaya patriarki yang sudah mengakar di lingkungan masyarakat kita bisa dijadikan analisis awal untuk menjawab mengapa partisipasi masyarakat sangat rendah khususnya dalam proses musrenbang dan umumnya dengan berbagai aktivitas dalam lingkup ruang publik yang berkaitan dengan masyarakat luas.

Fenomena minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan dampak langsung dari fenomena tersebut dengan pembangunan yang akan dilakukan di daerah terkait, adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena harapan masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan sangat kompleks, namun pelaksanaanya belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Penjelasan di atas, dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi relatif masih rendah. Faktor minimnya sosialisasi dan ketidakpedulian dari warga adalah dua hal utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang rendah tersebut semakin diperparah dengan perencanaan yang belum mengarah

pada masalah dan kebutuhan masyarakat, serta belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan segala usulan-usulan masyarakat pada tahapan penggalian gagasan sebelumnya tidak terlaksana dan tidak menunjukkan hasil sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat, selain itu masyarakat belum memperoleh peluang yang sama dalam menyumbangkan pemikiran dan masih terkendala waktu dan tempat. Masyarakat belum dilibatkan dalam memutuskan kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi. fenomena yang terlihat juga menunjukkan keaktifan masyarakat hanya sampai pada awal perencanaan pembangunan saja, tahap selanjutnya masyarakat menunjukkan sikap yang kurang aktif bahkan tidak memiliki kesadaran untuk menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan sebagai cerminan dasar perancangan penelitian dalam rangka mendapatkan data adalah jenis penelitian kualitatif. Desain kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu objek penelitian, kemudian dianalisis sesuai

dengan data yang dikumpulkan. (Masyhuri dan Zainuddin, 2009:13). Lokasi penelitian yang ditetapkan peneliti adalah Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Jumlah informan dalam penelitian ini 5 orang yang terdiri dari aparat desa dan tokoh masyarakat. Teknik penarikan informan menggunakan Purposive.

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan bottom-up. Dalam memahami konsep partisipasi masyarakat sebaiknya terlebih dahulu kita harus memahami siapa yang berpartisipasi, dalam hal ini yaitu masyarakat. Definisi dan pengertian mengenai masyarakat telah banyak di kemukakan oleh para antropologi dan sosiologi. Hinton dalam Soekanto (2003:24) dengan mengatakan bahwa

masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja bersama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas diketahui bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia sebagai satu kesatuan dan merupakan satu sistem yang menimbulkan kebudayaan dan kebiasaan dimana setiap orang merasa terikat satu sama lain yang mencakup semua hubungannya baik dalam kelompok maupun individu didalam satu wilayah. Selain itu masyarakat dapat juga disimpulkan sebagai kesatuan hidup manusia dan berinteraksi menurut sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh satu rasa identitas bersama. Partisipasi berasal dari kata *participation* yang artinya peran serta, dan secara luas di artikan peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan (Cohen dan Uphoff, 1980:76). Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan beberapa pemikiran, tenaga waktu, keahlian, modal dana atau

meteri serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih sangat terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, orang akan menemukan rumusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Mikkelsen (1999:64), membagi partisipasi menjadi beberapa pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah "pemekaan"(membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan

menggunakan kebebasan untuk melakukan hal itu.

5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring, proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tinggede dengan menggunakan model pendekatan dari Ericson yang terdiri dari partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi di dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi di dalam pemanfaatan.

Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan.

Isbandi (2007:27) mengatakan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengenai masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan

potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam musyawarah. Peningkatan keaktifan dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Pembangunan yang ada di Desa Tinggede merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang sebagai langkah awal mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Desa Tinggede merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan didasari pengkajian keadaan desa, pemerintah desa memulai proses penggalian gagasan dan pengumpulan data secara komprehensif mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait

yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat. Dengan pembangunan partisipatif yang melibatkan BPD beserta unsur masyarakat ini, pemerintah desa berharap pengelolaan pembangunan akan senantiasa mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat lingkungan/dusun melalui mekanisme kepala lingkungan/ kepala dusun dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Tinggede dalam tahapan perencanaan pembangunan relatif masih sangat rendah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam tahapan perencanaan, karena masyarakat belum dilibatkan secara penuh dalam memutuskan kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi. Perencanaan belum sepenuhnya mengacuh pada masalah dan kebutuhan masyarakat, belum memperhatikan aspirasi masyarakat. Selain itu, masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan saran dan masukan yang sifatnya membangun. Bahkan masih banyak saran dan masukan pada tahapan penggalian gagasan ditingkat dusun yang sampai saat ini belum terealisasi. Masalah lain yang membuat masyarakat Desa Tinggede kurang berpartisipasi dalam tahapan perencanaan dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa, sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat. Penyebab lain dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena musyawarah tersebut dirasakan warga tidak memberikan perbaikan yang optimal. Masalah dan kebutuhan yang diusulkan tidak disertai upaya pemecahan oleh pemerintah, sehingga hasil kegiatan

hanya merupakan daftar masalah dan kebutuhan, yang membuat sebagian warga enggan menghadiri kembali kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Partisipasi di Dalam Tahap Pelaksanaan

Untuk melaksanakan program pembangunan di daerah diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan semangat rasa kebersamaan, dan kesedian berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Adisasmita (2006:38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang di kerjakan dimasyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam

pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek jika dikaitkan dalam konteks pembangunan maka partisipasi diartikan tidak hanya sebatas perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi yang paling penting adalah sejauh mana pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat turut serta mengawasi, menjaga serta membantu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang ada di desa tinggede maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam tahap pelaksanaan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya. Adapun yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pada penelitian ini yaitu

keterlibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan, yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan ide-ide yang dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan. Serta peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan berupa barang/jasa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa rendahnya peran serta masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan di desa tinggede disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu pengetahuan dan pendidikan yang relatif masih rendah, serta pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan, khususnya dalam tahapan pelaksanaan program pembangunan. rendahnya pelibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program pembangunan yang dikerjakan, akibatnya Program yang direalisasikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya setempat.

Partisipasi di Dalam Pemanfaatan

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena

merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam penelitian ini adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan suatu proyek yang telah selesai dikerjakan, dengan merujuk pada peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah selesai dikerjakan, serta kepedulian masyarakat untuk mempergunakan sesuai dengan manfaatnya untuk kepentingan bersama. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya. Selanjutnya partisipasi

masyarakat dalam pemanfaatan program hasil pembangunan untuk dipergunakan sesuai dengan manfaatnya untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Partisipasi masyarakat Desa Tinggede di Dalam Pemanfaatan hasil pembangunan relatif masih rendah, seperti masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga ketidakpedulian masyarakat tersebut berakibat terjadinya pendangkalan pada drainase/saluran air. Belum tegasnya pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pengemudi dumtruck yang melintasi jalan yang tidak sesuai dengan bobotnya. Akibat dari rendahnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan sesuai dengan fungsinya sehingga mengakibatkan program hasil pembangunan tersebut mudah rusak. Secara keseluruhan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan yang dilihat dari pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan disimpulkan belum menunjukkan hasil yang relatif belum maksimal, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan meskipun hasil pembangunan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat umum, namun adanya sikap yang kurang sadar tersebut akan menghambat jalannya proses

pembangunan khususnya di Desa Tinggede. Dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pemanfaatan, akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan penataan program pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program pembangunan yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi mereka dalam program pembangunan tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Desa Tinggede relatif masih sangat rendah, khususnya pada tahap musrenbang desa. Adapun faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, yaitu usulan-usulan, saran, dan masukan yang disampaikan masyarakat jarang sekali terealisasi,

sehingga nampak pada tahap pelaksanaan pembangunan, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak menunjukkan hasil sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara infrastruktur/program hasil pembangunan. Disisi lain, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menggunakan program hasil pembangunan sebagaimana mestinya, sesuai dengan manfaat dan kegunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cohen, J.M.N.T, Uphoff. 1980. Rural Development Participation. New York :Ishaca.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007 Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komonitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan Fisip UI Press.
- Masyuri dan Zainuddin. M. 2009. Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung. Refika Aditama
- Mikkelsen Britha 1999 Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebauah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi

Receive : 19 May 2022

Revised : 03 June 2022

Accepted : 03 June 2022

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i1.46

Lapangan Yayasan Obor
Indonesia. Jakarta.

Slamet, Y. 1994. Pembangunan
Masyarakat Berwawasan
Partisipasi. Surakarta sebelas maret
University Prees.

Soekanto Soerjono. 2003. Peranan
Sosiologis Suatu Pengantar.
Jakarta. Rajawali Pers.

Surat Edaran Bersama antara Menteri
Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Dalam
Negeri, Nomor 0259/M.
PPN/I/2005/050/166/SJ

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 25 Tahun 2004. tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa